

Good Governance dan Daya Saing Nasional

Tata kelola yang baik sebagai fondasi produktivitas, inovasi, dan kepercayaan

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1 Apa itu Good Governance?



Good governance adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, partisipatif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2 Pilar Utama



Transparansi



Akuntabilitas



Efektivitas Pemerintahan



Kualitas Regulasi



Rule of Law



Pengendalian Korupsi

3 Mengapa penting bagi daya saing nasional?



Menurunkan biaya transaksi



Meningkatkan kepercayaan investor dan publik



Mempercepat pelayanan dan perizinan



Mendorong inovasi dan produktivitas



Membuka akses ekonomi yang lebih inklusif

4 Dampak pada Ekonomi



Good Governance



Kepastian Hukum



Iklim Usaha Sehat



Investasi Produktif



Inovasi & Efisiensi



Daya Saing Nasional

5 Tantangan Indonesia



Korupsi dan ekonomi rente



Regulasi yang tumpang tindih



Kualitas birokrasi yang belum merata



Ketimpangan wilayah dan layanan publik



Keterbatasan inovasi, riset, dan SDM

6 Agenda Strategis



Reformasi birokrasi berbasis merit



Digital government yang terintegrasi



Regulasi sederhana dan konsisten



Penegakan hukum yang adil



Penguatan UMKM, inovasi, dan pendidikan



Belanja publik berbasis hasil

7 Agenda Strategis



8



Daya saing nasional tidak hanya dibangun oleh sumber daya, tetapi oleh **kualitas tata kelola**. Negara yang dikelola lebih baik akan tumbuh **lebih kuat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan**.

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

23 Juni 2026

GOOD GOVERNANCE DAN DAYA SAING NASIONAL

Abstrak

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu fondasi utama daya saing nasional. Dalam ekonomi global yang semakin terbuka, digital, tidak pasti, dan kompetitif, keunggulan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, jumlah penduduk, luas pasar, atau biaya tenaga kerja. Keunggulan nasional semakin ditentukan oleh kualitas institusi: apakah hukum dapat dipercaya, apakah regulasi konsisten, apakah birokrasi efektif, apakah korupsi terkendali, apakah kebijakan publik berbasis data, apakah pelayanan publik mudah diakses, dan apakah negara mampu menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi serta investasi produktif. Dengan kata lain, good governance bukan sekadar agenda administratif, melainkan strategi ekonomi-politik untuk membangun produktivitas, kepercayaan, dan daya saing jangka panjang.

World Bank melalui Worldwide Governance Indicators menjelaskan tata kelola sebagai tradisi dan institusi yang menentukan bagaimana otoritas negara dijalankan, serta mengukurnya dalam enam dimensi utama: *voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption*.

([World Bank](#)) Dimensi-dimensi tersebut berhubungan langsung dengan daya saing karena investor, pelaku usaha, pekerja, konsumen, akademisi, dan masyarakat membutuhkan kepastian, efisiensi, integritas, dan kualitas layanan publik. Negara dengan tata kelola baik biasanya lebih mampu

menurunkan biaya transaksi, mempercepat perizinan, menjaga stabilitas kebijakan, memperkuat inovasi, dan membangun kepercayaan publik.

Dalam konteks Indonesia, isu good governance menjadi semakin strategis. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan yang relatif tangguh; World Bank mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% pada paruh pertama 2025 dan memproyeksikan pertumbuhan sekitar 4,8% hingga 2027 di tengah ketidakpastian global. ([World Bank](#)) Namun, daya saing Indonesia masih menghadapi tantangan kelembagaan. Dalam IMD World Competitiveness Ranking 2025, Indonesia berada pada peringkat ke-40, turun 13 posisi dari peringkat ke-27 pada 2024. ([IMD Business School](#)) Di bidang inovasi, WIPO Global Innovation Index 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-55 dari 139 ekonomi, dengan kekuatan relatif pada institusi dan *market sophistication*, tetapi kelemahan pada *human capital and research*, *business sophistication*, dan infrastruktur. ([WIPO](#)) Sementara itu, Transparency International CPI 2025 memberi Indonesia skor 34 dan peringkat 109 dari 182 negara/wilayah, menunjukkan bahwa persepsi korupsi sektor publik masih menjadi hambatan penting bagi kualitas tata kelola. ([Transparency.org](#))

Artikel ini berargumen bahwa daya saing nasional Indonesia tidak cukup dibangun melalui pembangunan fisik, hilirisasi sumber daya alam, insentif investasi, atau digitalisasi prosedural. Semua itu penting, tetapi tidak akan optimal tanpa tata kelola yang kuat. Good governance adalah “infrastruktur tak terlihat” yang menentukan apakah modal dapat bergerak produktif, apakah kebijakan dipercaya, apakah inovasi berkembang, apakah UMKM memperoleh akses, apakah daerah mampu melayani warga, dan apakah pertumbuhan menghasilkan kesejahteraan luas. Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa Indonesia membutuhkan tata kelola yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga efektif, adaptif, transparan, berbasis data, antikorupsi, inklusif, dan berorientasi hasil.

Kata kunci:

good governance, tata kelola, daya saing nasional, government effectiveness, rule of law, regulatory quality, control of corruption, inovasi, investasi, Indonesia.

1. Pendahuluan

Daya saing nasional sering dibicarakan dalam bahasa ekonomi: pertumbuhan PDB, investasi, ekspor, produktivitas, infrastruktur, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan inovasi. Semua indikator tersebut memang penting. Namun di balik indikator ekonomi yang terlihat, terdapat fondasi yang lebih mendasar, yaitu tata kelola. Tidak ada daya saing yang kokoh tanpa institusi yang dapat dipercaya. Tidak ada investasi produktif yang berkelanjutan tanpa kepastian hukum. Tidak ada inovasi yang tumbuh luas tanpa regulasi yang mendukung eksperimen dan melindungi hak. Tidak ada pemerataan ekonomi tanpa birokrasi yang mampu melayani rakyat. Tidak ada produktivitas nasional tanpa negara yang efektif.

Good governance menjadi semakin penting karena dunia sedang memasuki fase kompetisi baru. Negara-negara tidak hanya bersaing dalam memproduksi barang murah, tetapi juga dalam membangun ekosistem inovasi, menarik talenta, mengelola data, membangun energi bersih, memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas fiskal, dan menciptakan kepercayaan. Dalam kompetisi seperti ini, negara yang regulasinya tidak konsisten, hukumnya lemah, birokrasi lambat, korupsinya tinggi, dan kebijakannya tidak transparan akan kehilangan peluang. Modal mungkin masuk, tetapi hanya mencari rente jangka pendek. Industri mungkin tumbuh, tetapi tidak produktif. Infrastruktur mungkin dibangun, tetapi biayanya mahal. Digitalisasi mungkin dilakukan, tetapi hanya menambah aplikasi tanpa memperbaiki layanan.

Good governance adalah konsep yang sering terdengar normatif. Ia seolah-olah hanya berkaitan dengan etika pemerintahan, akuntabilitas, atau pemberantasan korupsi. Padahal, good governance memiliki

konsekuensi ekonomi yang sangat konkret. Ketika izin usaha cepat, biaya memulai usaha turun. Ketika aturan jelas, risiko investasi turun. Ketika pengadaan transparan, kualitas proyek meningkat. Ketika pengadilan dipercaya, kontrak lebih mudah ditegakkan. Ketika data publik terbuka, inovasi kebijakan meningkat. Ketika korupsi ditekan, biaya ekonomi turun. Ketika pemerintah bekerja efektif, masyarakat dan pelaku usaha lebih percaya.

Daya saing nasional karena itu bukan hanya persoalan pasar, tetapi juga persoalan negara. Negara yang terlalu lemah gagal menyediakan barang publik, gagal menegakkan hukum, dan gagal melindungi kompetisi. Negara yang terlalu kuat tetapi tidak akuntabel dapat menciptakan rente, ketidakpastian, dan distorsi. Negara yang efektif adalah negara yang mampu mengarahkan pembangunan, tetapi tetap tunduk pada hukum; mampu mendorong investasi, tetapi tetap melindungi kepentingan publik; mampu mempercepat pelayanan, tetapi tetap menjaga integritas; mampu menggunakan teknologi, tetapi tetap menghormati hak warga.

Indonesia berada pada titik penting. Secara ekonomi, Indonesia memiliki modal besar: penduduk besar, pasar domestik luas, sumber daya alam strategis, posisi geopolitik penting, ekonomi digital berkembang, dan peluang hilirisasi. Namun, modal tersebut hanya akan menjadi daya saing jika dikelola dengan institusi yang baik. Tanpa good governance, sumber daya alam dapat berubah menjadi rente. Pasar besar dapat menjadi arena monopoli. Digitalisasi dapat menjadi fragmentasi aplikasi. Hilirisasi dapat menghasilkan nilai tambah yang tidak merata. Infrastruktur dapat mahal dan tidak efektif. Investasi dapat masuk, tetapi tidak membawa transfer teknologi.

Karena itu, pertanyaan utama artikel ini adalah: **bagaimana good governance membentuk daya saing nasional Indonesia, dan reformasi apa yang diperlukan agar tata kelola menjadi mesin produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan?**

2. Memahami Good Governance

Good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang mencakup cara kekuasaan publik dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Tata kelola tidak hanya menyangkut pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, lembaga negara, birokrasi, pengadilan, parlemen, BUMN, regulator, masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan warga negara. Good governance menuntut agar kekuasaan dijalankan secara sah, transparan, akuntabel, efektif, partisipatif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

World Bank melalui Worldwide Governance Indicators mengukur tata kelola dalam enam dimensi: *voice and accountability*, *political stability and absence of violence*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption*. ([World Bank](#)) Enam dimensi ini dapat dipahami sebagai pilar-pilar tata kelola modern.

Pertama, **voice and accountability**. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan warga untuk berpartisipasi, menyampaikan suara, memperoleh informasi, dan mengawasi kekuasaan. Dalam ekonomi modern, akuntabilitas penting karena kebijakan yang tidak dapat dikritik cenderung mudah menyimpang.

Kedua, **political stability and absence of violence**. Stabilitas politik menciptakan kepastian bagi investasi, perdagangan, dan kegiatan ekonomi. Namun stabilitas yang sehat bukan berarti menekan kritik, melainkan menciptakan aturan politik yang dapat diprediksi dan damai.

Ketiga, **government effectiveness**. Dimensi ini mencakup kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparatur, dan kredibilitas pelaksanaan kebijakan. Ini adalah inti daya saing administratif.

Keempat, **regulatory quality**. Regulasi yang baik memungkinkan sektor swasta berkembang secara sehat, mendorong kompetisi, mengurangi hambatan tidak perlu, dan melindungi kepentingan publik.

Kelima, **rule of law**. Hukum yang konsisten dan adil membuat kontrak dapat ditegakkan, hak milik terlindungi, sengketa diselesaikan, dan warga diperlakukan setara.

Keenam, **control of corruption**. Korupsi melemahkan semua aspek daya saing karena menaikkan biaya transaksi, merusak alokasi sumber daya, menurunkan kualitas proyek, dan menciptakan ketidakpercayaan.

Good governance bukan berarti negara harus kecil. Negara dapat besar tetapi efektif, atau kecil tetapi lemah. Yang penting adalah kualitas fungsi negara. Negara yang memiliki banyak anggaran tetapi belanjanya buruk tidak memiliki good governance. Negara yang memiliki banyak regulasi tetapi tidak menegakkan aturan secara adil juga tidak memiliki good governance. Negara yang digital tetapi datanya tidak aman dan layanannya membingungkan belum tentu memiliki good governance.

Dalam konteks pembangunan, good governance adalah kemampuan negara menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dan pasar bekerja produktif. Negara tidak menggantikan semua aktor ekonomi, tetapi menyediakan aturan, infrastruktur, perlindungan, dan koordinasi. Negara yang baik bukan negara yang mengatur segala hal secara berlebihan, tetapi negara yang mampu mengatur hal yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk tujuan yang tepat.

3. Memahami Daya Saing Nasional

Daya saing nasional adalah kemampuan suatu negara menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan, pekerja, daerah, dan institusi menghasilkan produktivitas tinggi secara berkelanjutan. Daya saing bukan sekadar kemampuan menjual produk murah. Daya saing adalah kemampuan menciptakan nilai tambah, inovasi, kualitas, efisiensi, kepercayaan, dan kesejahteraan.

Michael Porter menjelaskan bahwa daya saing nasional bertumpu pada produktivitas. Negara tidak bersaing seperti perusahaan dalam arti sempit.

Yang bersaing adalah kemampuan ekosistem nasional untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan tenaga kerja. Negara dengan produktivitas tinggi dapat membayar upah lebih baik, membiayai layanan publik lebih baik, dan tetap bersaing dalam pasar global.

Daya saing memiliki banyak dimensi. Ada daya saing biaya, seperti upah, energi, dan logistik. Ada daya saing kualitas, seperti standar produk, teknologi, dan SDM. Ada daya saing kelembagaan, seperti hukum, regulasi, birokrasi, dan korupsi. Ada daya saing inovasi, seperti riset, paten, startup, universitas, dan kolaborasi industri. Ada daya saing sosial, seperti kesehatan, pendidikan, stabilitas, dan kohesi masyarakat. Ada pula daya saing ekologis, karena ekonomi masa depan menuntut keberlanjutan.

Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan daya saing berbasis biaya murah. Upah rendah bukan strategi jangka panjang yang bermartabat. Sumber daya alam besar juga tidak cukup. Banyak negara kaya SDA gagal menjadi negara maju karena tata kelola lemah. Pasar domestik besar pun belum cukup jika inovasi dan produktivitas rendah. Karena itu, Indonesia harus membangun daya saing berbasis institusi, produktivitas, teknologi, dan manusia.

Indikator internasional memberi gambaran posisi Indonesia. IMD World Competitiveness Ranking 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-40, turun dari peringkat ke-27 pada 2024. ([IMD Business School](#))

Penurunan ini perlu dibaca sebagai peringatan bahwa daya saing tidak dapat dianggap otomatis. Keberhasilan satu tahun dapat menurun jika kualitas kebijakan, stabilitas, efisiensi bisnis, infrastruktur, dan kelembagaan tidak terus diperbaiki. Di bidang inovasi, Indonesia berada pada peringkat ke-55 dari 139 ekonomi dalam Global Innovation Index 2025, dan WIPO mencatat bahwa Indonesia termasuk *innovation overperformer*, tetapi masih memiliki kelemahan pada modal manusia dan riset, *business sophistication*, serta infrastruktur. ([WIPO](#))

Dari sini terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi, tetapi potensi itu membutuhkan tata kelola yang konsisten. Daya saing tidak dapat dibangun

hanya dengan slogan investasi atau proyek besar. Daya saing dibangun melalui institusi yang bekerja setiap hari.

4. Hubungan Good Governance dan Daya Saing

Good governance memengaruhi daya saing melalui beberapa jalur.

4.1 Menurunkan Biaya Transaksi

Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi, mengurus izin, menegakkan kontrak, menghindari risiko, membayar pungutan, atau menghadapi ketidakpastian. Birokrasi lambat, regulasi tumpang tindih, korupsi, dan hukum tidak pasti semuanya menaikkan biaya transaksi. Ketika biaya transaksi tinggi, perusahaan menjadi kurang produktif. UMKM sulit tumbuh. Investor meminta imbal hasil lebih tinggi. Konsumen membayar harga lebih mahal.

Good governance menurunkan biaya transaksi dengan membuat aturan jelas, layanan cepat, data terbuka, dan hukum dapat dipercaya. Negara yang efektif membuat pelaku usaha dapat fokus pada inovasi dan produksi, bukan menghabiskan energi untuk menavigasi birokrasi.

4.2 Meningkatkan Kepercayaan

Kepercayaan adalah modal ekonomi. Investor membutuhkan kepercayaan bahwa aturan tidak berubah tiba-tiba. Warga membutuhkan kepercayaan bahwa pajak digunakan dengan baik. Pelaku usaha membutuhkan kepercayaan bahwa kontrak dilindungi. Daerah membutuhkan kepercayaan bahwa transfer fiskal adil. Tanpa kepercayaan, semua pihak mengambil sikap defensif: menahan investasi, menyimpan modal, mencari proteksi, atau melakukan informalitas.

Good governance menciptakan kepercayaan karena keputusan publik dapat dijelaskan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

4.3 Mendorong Investasi Produktif

Investasi yang masuk ke negara dengan tata kelola lemah sering cenderung mencari rente: akses lahan, sumber daya alam, proteksi, atau konsesi khusus. Investasi produktif membutuhkan kepastian, SDM, infrastruktur, perlindungan hak, dan kebijakan yang konsisten. Good governance mengarahkan investasi dari rente menuju produktivitas.

4.4 Meningkatkan Inovasi

Inovasi membutuhkan kebebasan berpikir, perlindungan hak kekayaan intelektual, ekosistem riset, pembiayaan, kompetisi, dan kolaborasi. Regulasi yang buruk dapat mematikan inovasi. Korupsi dapat mengalihkan sumber daya dari riset ke lobi. Birokrasi lambat dapat menunda eksperimen. Good governance menciptakan lingkungan inovasi yang sehat.

4.5 Memperkuat Inklusi Ekonomi

Daya saing yang sehat tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. Good governance memastikan UMKM, pekerja, petani, nelayan, perempuan, pemuda, daerah tertinggal, dan kelompok rentan memperoleh akses terhadap layanan, pembiayaan, pendidikan, perlindungan hukum, dan pasar. Inklusi memperluas basis produktivitas nasional.

4.6 Menjaga Stabilitas Jangka Panjang

Kebijakan yang tidak transparan dapat menghasilkan pertumbuhan cepat tetapi rapuh. Good governance menjaga agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan, keadilan sosial, fiskal, dan legitimasi publik. Daya saing modern harus berkelanjutan.

5. Indonesia: Potensi Besar, Tata Kelola Menentukan

Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara berdaya saing tinggi. Pertama, jumlah penduduk besar menciptakan pasar domestik dan tenaga kerja besar. Kedua, sumber daya alam strategis seperti nikel, tembaga, sawit, batu bara, gas, hutan, laut, dan biodiversitas memberi modal industri. Ketiga, posisi geografis Indonesia berada di jalur penting Indo-Pasifik. Keempat, ekonomi digital berkembang pesat. Kelima, kelas

menengah dan generasi muda menjadi basis transformasi konsumsi dan inovasi.

Namun potensi tidak otomatis menjadi keunggulan. Banyak negara memiliki sumber daya besar tetapi gagal maju karena tata kelola buruk. Banyak negara memiliki penduduk besar tetapi menghadapi pengangguran dan informalitas. Banyak negara memiliki pasar besar tetapi dikuasai monopoli. Banyak negara membangun infrastruktur tetapi tidak meningkatkan produktivitas karena proyek tidak terintegrasi.

World Bank mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% pada paruh pertama 2025 dan diproyeksikan tetap sekitar 4,8% hingga 2027. ([World Bank](#)) Stabilitas pertumbuhan ini penting, tetapi Indonesia ingin lebih dari sekadar stabil. Untuk mencapai lompatan menuju negara berpendapatan tinggi, Indonesia memerlukan pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat. Di sinilah good governance menjadi penentu.

Tantangan Indonesia meliputi korupsi, ketidakpastian regulasi, kualitas SDM, koordinasi pusat-daerah, kualitas belanja publik, pasar tenaga kerja, ketimpangan wilayah, infrastruktur digital, dan penegakan hukum. Sebagian tantangan ini bukan masalah kekurangan modal, melainkan masalah tata kelola.

Misalnya, hilirisasi mineral dapat meningkatkan nilai tambah, tetapi hanya jika tata kelola izin, lingkungan, tenaga kerja, energi, teknologi, dan kemitraan industri kuat. Digitalisasi birokrasi dapat mempercepat layanan, tetapi hanya jika data terintegrasi dan sistem tidak tumpang tindih. Investasi asing dapat masuk, tetapi hanya jika membawa transfer teknologi dan tidak hanya mengejar insentif. Dana APBN dapat besar, tetapi hanya berdampak bila belanja berbasis hasil.

Indonesia karena itu membutuhkan agenda good governance yang langsung dikaitkan dengan daya saing nasional, bukan diperlakukan sebagai agenda moral terpisah.

6. Government Effectiveness: Birokrasi sebagai Mesin Daya Saing

Government effectiveness adalah kemampuan negara menyusun kebijakan, melaksanakan program, memberikan layanan publik, dan menghasilkan hasil nyata. Dalam daya saing nasional, birokrasi adalah infrastruktur institusional. Birokrasi yang efektif mempercepat usaha, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung inovasi.

Birokrasi yang tidak efektif menghasilkan banyak biaya tersembunyi. Pengusaha kehilangan waktu mengurus izin. Warga kehilangan waktu mengakses layanan. Investor ragu karena koordinasi lambat. Proyek terlambat. Data tidak sinkron. Program sosial salah sasaran. Daerah menunggu arahan pusat. Semua itu mengurangi produktivitas nasional.

Reformasi birokrasi Indonesia harus bergerak dari reformasi prosedur menuju reformasi kapabilitas. Selama ini, reformasi birokrasi sering diukur melalui dokumen, indeks, tunjangan kinerja, zona integritas, dan kepatuhan administratif. Hal-hal tersebut penting, tetapi belum cukup. Birokrasi harus dinilai dari hasil: apakah izin lebih cepat, apakah sekolah lebih baik, apakah kemiskinan turun, apakah layanan kesehatan membaik, apakah investasi produktif meningkat, apakah masyarakat puas.

Birokrasi modern membutuhkan beberapa kompetensi baru. Pertama, kemampuan analisis data. Kedua, kemampuan koordinasi lintas sektor. Ketiga, kemampuan desain layanan berbasis pengguna. Keempat, kemampuan manajemen risiko. Kelima, kemampuan digital. Keenam, integritas. Ketujuh, keberanian melakukan inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam era AI dan digitalisasi, birokrasi tidak boleh sekadar menjadi pengguna aplikasi. Birokrasi harus menjadi organisasi pembelajar. Data harus digunakan untuk memahami masalah, bukan hanya untuk pelaporan. Evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki kebijakan, bukan hanya untuk memenuhi prosedur. Pemerintah harus bekerja sebagai *whole-of-government*, bukan kumpulan instansi yang berjalan sendiri-sendiri.

Birokrasi yang efektif akan menjadi keunggulan kompetitif Indonesia. Sebaliknya, birokrasi yang lambat akan menjadi hambatan bahkan ketika Indonesia memiliki modal ekonomi besar.

7. Regulatory Quality: Regulasi yang Membuka, Bukan Menutup

Regulasi adalah aturan main ekonomi. Regulasi yang baik membuka kompetisi, melindungi konsumen, menjaga lingkungan, mempermudah investasi, dan mendorong inovasi. Regulasi yang buruk menciptakan ketidakpastian, rente, monopoli, biaya kepatuhan tinggi, dan hambatan masuk.

Regulatory quality berarti kemampuan pemerintah merumuskan dan menjalankan regulasi yang mendukung pembangunan sektor swasta dan kepentingan publik. Regulasi bukan hanya soal deregulasi. Banyak orang mengira daya saing selalu berarti mengurangi regulasi. Pandangan ini tidak lengkap. Yang dibutuhkan bukan sekadar sedikit regulasi, tetapi regulasi yang tepat.

Deregulasi tanpa pengawasan dapat menciptakan eksploitasi lingkungan, pekerja, dan konsumen. Regulasi berlebihan dapat mematikan usaha kecil dan inovasi. Regulasi yang baik berada di tengah: cukup kuat untuk melindungi kepentingan publik, cukup sederhana untuk mempermudah kegiatan ekonomi, cukup fleksibel untuk inovasi, dan cukup tegas untuk mencegah rente.

Indonesia menghadapi tantangan regulasi karena banyak aturan tumpang tindih antara pusat dan daerah, antar-kementerian, dan antar-sektor. Pelaku usaha sering menghadapi ketidakpastian implementasi. UMKM sering kesulitan memahami syarat legalitas. Investor besar mungkin mampu mengurusnya, tetapi pelaku kecil tertinggal.

Regulasi yang baik harus melalui analisis dampak. Setiap regulasi perlu menjawab: masalah apa yang diselesaikan? siapa yang terdampak? berapa biaya kepatuhan? apakah UMKM mampu mematuhi? apakah regulasi

membuka kompetisi atau melindungi pemain lama? apakah ada risiko korupsi? apakah data mendukung? apakah ada mekanisme evaluasi?

Regulasi yang berkualitas adalah salah satu mesin daya saing. Negara yang memiliki regulasi jelas dan konsisten akan lebih dipercaya.

8. Rule of Law: Kepastian Hukum sebagai Modal Ekonomi

Rule of law adalah prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks daya saing, rule of law menentukan biaya risiko. Jika kontrak sulit ditegakkan, investor ragu. Jika sengketa tanah tidak jelas, proyek tertunda. Jika perizinan dapat berubah karena tekanan politik, biaya modal naik. Jika hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, kepercayaan publik runtuh.

Kepastian hukum bukan hanya kebutuhan investor besar. UMKM juga membutuhkan kepastian hukum. Petani membutuhkan kepastian tanah. Nelayan membutuhkan kepastian ruang laut. Pekerja membutuhkan kepastian hak. Konsumen membutuhkan perlindungan. Masyarakat adat membutuhkan pengakuan. Lingkungan membutuhkan penegakan aturan. Rule of law yang baik memperluas akses ekonomi karena semua aktor memiliki perlindungan yang sama.

Dalam ekonomi modern, rule of law juga terkait dengan hak kekayaan intelektual, perlindungan data, kontrak digital, keamanan siber, transaksi elektronik, dan tata kelola AI. Jika hukum tidak mampu mengikuti teknologi, inovasi dapat terhambat atau disalahgunakan.

Penegakan hukum yang adil juga mengurangi ekonomi rente. Ketika hukum dapat dibeli, pelaku usaha produktif kalah dari pelaku yang dekat dengan kekuasaan. Ketika pelanggaran lingkungan tidak dihukum, perusahaan yang patuh menjadi kurang kompetitif. Ketika pengadaan dapat dimanipulasi, kualitas proyek menurun.

Karena itu, reformasi hukum adalah agenda daya saing. Daya saing bukan hanya soal mempermudah investasi, tetapi memastikan semua pelaku ekonomi bermain dalam aturan yang adil.

9. Control of Corruption: Korupsi sebagai Pajak Gelap atas Daya Saing

Korupsi adalah pajak gelap yang merusak daya saing. Ia menaikkan biaya, menciptakan ketidakpastian, mengalihkan sumber daya ke aktivitas tidak produktif, menurunkan kualitas proyek, dan melemahkan kepercayaan. Korupsi membuat perusahaan yang paling efisien belum tentu menang; yang menang adalah yang paling mampu membeli akses.

Transparency International CPI 2025 memberi Indonesia skor 34 dan peringkat 109 dari 182 negara/wilayah. ([Transparency.org](https://www.transparency.org)) Skor ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi sektor publik masih menjadi tantangan serius. CPI adalah indikator persepsi, bukan ukuran sempurna seluruh korupsi, tetapi ia penting karena persepsi memengaruhi kepercayaan investor, warga, dan pelaku usaha.

Korupsi merusak daya saing melalui beberapa jalur. Pertama, korupsi meningkatkan biaya transaksi. Kedua, korupsi menurunkan kualitas infrastruktur karena biaya proyek bocor. Ketiga, korupsi menciptakan regulasi yang bias. Keempat, korupsi melemahkan penerimaan pajak. Kelima, korupsi merusak meritokrasi birokrasi. Keenam, korupsi menurunkan moral masyarakat.

Pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penindakan. Penindakan penting, tetapi korupsi harus dicegah melalui sistem. Sistem itu mencakup transparansi pengadaan, beneficial ownership, digitalisasi proses, penguatan audit, perlindungan pelapor, pembatasan konflik kepentingan, reformasi pembiayaan politik, dan penguatan integritas birokrasi.

Dalam konteks daya saing, antikorupsi harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi. Korupsi bukan hanya masalah hukum; korupsi adalah hambatan

produktivitas. Negara yang ingin kompetitif harus menekan korupsi karena korupsi membuat ekonomi mahal.

10. Voice, Accountability, dan Daya Saing Demokratis

Sering muncul anggapan bahwa akuntabilitas dan partisipasi memperlambat pembangunan. Anggapan ini perlu dikoreksi. Dalam jangka pendek, partisipasi memang dapat membuat proses kebijakan lebih panjang. Namun dalam jangka panjang, akuntabilitas mengurangi risiko kesalahan besar, meningkatkan legitimasi, dan memperbaiki kualitas kebijakan.

Voice and accountability memberi ruang bagi warga, media, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha untuk menyampaikan masukan serta mengawasi kebijakan. Kebijakan yang tidak mendapat kritik dapat terlihat cepat, tetapi mudah salah arah. Infrastruktur dapat dibangun tanpa memperhatikan dampak sosial. Regulasi dapat dibuat tanpa memahami pelaku kecil. Program sosial dapat salah sasaran. Pengawasan publik adalah mekanisme koreksi.

Daya saing demokratis berarti negara mampu bergerak cepat tanpa menutup kritik. Ini bukan hal mudah. Negara harus membangun mekanisme konsultasi publik yang bermakna, bukan formalitas. Data kebijakan harus dibuka. Naskah akademik harus dapat diakses. Dampak kebijakan harus dievaluasi. Media dan akademisi harus memiliki ruang untuk mengkritik.

Akuntabilitas juga memperkuat kepercayaan. Investor lebih percaya pada negara yang proses kebijakannya transparan. Warga lebih percaya pada pemerintah yang mau menjelaskan keputusan. Pelaku usaha lebih percaya pada regulasi yang tidak dibuat diam-diam.

Good governance karena itu bukan hambatan daya saing. Good governance adalah fondasi daya saing yang sah dan berkelanjutan.

11. Good Governance dan Inovasi Nasional

Daya saing masa depan sangat ditentukan oleh inovasi. Indonesia tidak dapat terus bergantung pada komoditas primer dan tenaga kerja murah. Indonesia perlu membangun ekonomi berbasis pengetahuan: riset, teknologi, desain, data, AI, manufaktur canggih, ekonomi kreatif, energi bersih, bioteknologi, pangan, kesehatan, dan digitalisasi.

Global Innovation Index 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-55 dari 139 ekonomi. WIPO mencatat Indonesia kuat pada dimensi institusi dan *market sophistication*, tetapi lemah pada *human capital and research*, *business sophistication*, dan infrastruktur. ([WIPO](#)) Ini menunjukkan bahwa inovasi Indonesia membutuhkan penguatan ekosistem, bukan hanya aplikasi teknologi.

Good governance mendukung inovasi melalui beberapa cara. Pertama, melindungi hak kekayaan intelektual. Kedua, menyediakan pembiayaan riset yang transparan. Ketiga, menghubungkan universitas dan industri. Keempat, mengurangi hambatan regulasi bagi eksperimen. Kelima, memastikan pengadaan pemerintah dapat membeli inovasi lokal. Keenam, membuka data publik untuk inovasi. Ketujuh, menjaga persaingan agar startup dan UMKM inovatif tidak dimatikan pemain dominan.

Inovasi membutuhkan toleransi terhadap risiko. Birokrasi yang terlalu takut salah dapat menghambat inovasi. Namun toleransi risiko harus disertai akuntabilitas. Negara perlu membedakan antara kegagalan inovasi yang wajar dan penyalahgunaan anggaran. Jika semua kegagalan dianggap korupsi, aparat takut bereksperimen. Jika semua eksperimen tanpa audit, korupsi dapat menyamar sebagai inovasi.

Tata kelola inovasi harus cerdas: memberi ruang untuk mencoba, tetapi tetap menjaga integritas.

12. Good Governance, Investasi, dan Hilirisasi

Indonesia sedang mendorong investasi dan hilirisasi, terutama pada mineral strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan sektor energi. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah domestik, menciptakan lapangan kerja, memperluas ekspor, dan memperkuat posisi geopolitik Indonesia. Namun hilirisasi hanya akan menjadi daya saing jika ditopang good governance.

Ada beberapa risiko tanpa tata kelola baik. Pertama, hilirisasi dapat menjadi rente bagi kelompok tertentu jika izin dan insentif tidak transparan. Kedua, kerusakan lingkungan dapat meningkat jika pengawasan lemah. Ketiga, nilai tambah lokal dapat terbatas jika teknologi dan manajemen tetap dikuasai luar. Keempat, konflik sosial dapat muncul bila masyarakat lokal tidak dilibatkan. Kelima, infrastruktur energi dapat membebani fiskal jika tidak dihitung cermat.

Good governance dalam hilirisasi berarti transparansi izin, standar lingkungan, perlindungan pekerja, transfer teknologi, pengawasan rantai pasok, keterlibatan daerah, dan evaluasi insentif. Insentif fiskal harus diberikan berdasarkan kinerja: ekspor bernilai tambah, pekerjaan berkualitas, riset, kandungan lokal, dan pengurangan emisi.

Investasi yang baik bukan hanya investasi besar. Investasi yang baik adalah investasi yang meningkatkan produktivitas nasional. Good governance membantu membedakan investasi produktif dari investasi rente.

13. Good Governance dan Ekonomi Digital

Ekonomi digital membuka peluang besar bagi Indonesia. E-commerce, fintech, layanan digital, AI, data center, cloud, platform, dan industri kreatif dapat meningkatkan produktivitas. Namun ekonomi digital juga membawa risiko: monopoli platform, penyalahgunaan data, pinjaman online bermasalah, disinformasi, ketimpangan akses digital, dan ketergantungan teknologi asing.

Good governance dalam ekonomi digital mencakup perlindungan data pribadi, keamanan siber, interoperabilitas sistem, persaingan platform, literasi digital, perlindungan konsumen, dan transparansi algoritmik untuk sektor berisiko. Negara harus mendorong inovasi tanpa membiarkan warga menjadi objek eksploitasi data.

Digital government juga menjadi bagian penting daya saing. Layanan publik digital dapat mempercepat perizinan, pengadaan, pajak, bantuan sosial, dan administrasi. Namun digitalisasi tidak boleh hanya berarti memperbanyak aplikasi. Digitalisasi harus menyederhanakan kehidupan warga dan pelaku usaha. Prinsipnya: data sekali, layanan terintegrasi, proses jelas, keamanan terjaga, dan hak warga dilindungi.

Indonesia telah bergerak dalam pemerintahan digital, tetapi tantangan integrasi data dan koordinasi lintas lembaga masih besar. Good governance digital berarti teknologi digunakan untuk memperbaiki institusi, bukan menutupi kelemahan institusi.

14. Good Governance dan UMKM

UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi sering menghadapi hambatan akses modal, pasar, teknologi, legalitas, sertifikasi, dan informasi. Good governance menentukan apakah UMKM dapat naik kelas atau tetap berada di sektor informal dengan produktivitas rendah.

Regulasi yang rumit sering lebih berat bagi UMKM daripada perusahaan besar. Pelaku besar memiliki konsultan, pengacara, dan jaringan. UMKM tidak. Karena itu, regulasi perlu bersifat proporsional. Legalitas usaha kecil harus mudah, murah, dan disertai manfaat nyata: akses kredit, pelatihan, pasar, pengadaan, dan perlindungan hukum.

Pengadaan pemerintah dapat menjadi alat penting memperluas akses UMKM. Jika transparan dan didesain inklusif, APBN dapat menjadi pasar bagi produk lokal. Namun pengadaan juga rawan korupsi dan jaringan

tertutup. Good governance memastikan pengadaan terbuka, kompetitif, dan memberi peluang nyata kepada pelaku kecil.

UMKM juga membutuhkan data dan pendampingan. Digitalisasi UMKM bukan hanya meminta mereka masuk marketplace, tetapi membantu mereka memahami pembukuan, pemasaran, kualitas produk, logistik, perpajakan, dan perlindungan konsumen.

Daya saing nasional tidak hanya dibangun oleh perusahaan besar. Daya saing nasional dibangun oleh jutaan pelaku kecil yang produktif. Good governance membuka jalan bagi mereka.

15. Good Governance dan Desentralisasi

Indonesia adalah negara besar dan majemuk. Daya saing nasional tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Daerah harus menjadi motor daya saing. Namun desentralisasi membutuhkan tata kelola yang kuat. Jika daerah inovatif, otonomi dapat mempercepat pelayanan. Jika daerah lemah, otonomi dapat memperbesar ketimpangan. Jika elite lokal dominan, otonomi dapat menjadi ruang rente.

Good governance dalam desentralisasi menuntut pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah. Pusat perlu menetapkan standar, data, pembiayaan, dan pengawasan. Daerah perlu diberi ruang adaptasi dan inovasi. Transfer fiskal harus berbasis kebutuhan dan kinerja. Kapasitas aparatur daerah harus diperkuat.

Daya saing daerah mencakup kualitas infrastruktur, perizinan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, keamanan, kebersihan, dan kualitas lingkungan. Daerah yang mampu membangun tata kelola baik akan lebih menarik investasi dan talenta. Namun daya saing daerah tidak boleh berubah menjadi perlombaan memberi insentif murah atau melemahkan standar lingkungan. Daya saing daerah harus berbasis kualitas layanan dan produktivitas.

Desentralisasi yang baik menghasilkan kompetisi sehat antar-daerah dalam inovasi pelayanan publik. Desentralisasi yang buruk menghasilkan fragmentasi regulasi dan biaya ekonomi. Good governance menentukan arah tersebut.

16. Good Governance dan Kualitas Belanja Publik

APBN dan APBD adalah instrumen daya saing jika dibelanjakan secara produktif. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, perlindungan sosial, pangan, energi, dan digitalisasi membutuhkan belanja publik. Namun belanja besar tidak otomatis menghasilkan daya saing. Yang menentukan adalah kualitas belanja.

Belanja publik yang berkualitas memiliki ciri: tepat sasaran, berbasis kebutuhan, transparan, efisien, terukur hasilnya, dan bebas kebocoran. Belanja pendidikan harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Belanja kesehatan harus meningkatkan kualitas hidup. Belanja infrastruktur harus menurunkan biaya logistik. Belanja riset harus mendorong inovasi. Belanja sosial harus melindungi dan memberdayakan.

Good governance mengubah anggaran dari logika serapan menjadi logika dampak. Dalam banyak birokrasi, keberhasilan masih diukur dari terserapnya anggaran. Padahal, serapan hanya menunjukkan uang dibelanjakan, bukan manfaat tercipta. Daya saing membutuhkan penganggaran berbasis hasil.

Pengadaan publik adalah titik penting. Jika pengadaan transparan, negara memperoleh barang dan jasa lebih baik dengan harga wajar. Jika pengadaan korup, kualitas turun dan biaya naik. Karena itu, e-procurement, audit, open contracting, dan transparansi beneficial ownership penting bagi daya saing.

17. Good Governance dan Kepercayaan Publik

Daya saing nasional tidak hanya bergantung pada kepercayaan investor, tetapi juga kepercayaan rakyat. Negara yang tidak dipercaya sulit menjalankan kebijakan. Masyarakat enggan membayar pajak. Reformasi subsidi ditolak. Kebijakan kesehatan dicurigai. Data pemerintah diragukan. Program sosial dipandang politis. Investasi besar ditolak masyarakat lokal.

Kepercayaan publik dibangun melalui pengalaman sehari-hari: layanan publik yang baik, hukum yang adil, pajak yang masuk akal, bantuan yang tepat sasaran, jalan yang baik, sekolah yang bermutu, rumah sakit yang siap, dan pejabat yang bertanggung jawab.

Good governance adalah mesin kepercayaan. Transparansi menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyembunyikan informasi. Akuntabilitas menunjukkan bahwa kesalahan dapat diperbaiki. Partisipasi menunjukkan bahwa warga dihargai. Integritas menunjukkan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Efektivitas menunjukkan bahwa negara mampu bekerja.

Dalam masyarakat digital, kepercayaan semakin mudah rusak bila kebijakan tidak dijelaskan. Pemerintah harus mampu berkomunikasi jujur, membuka data, dan merespons kritik. Komunikasi publik bukan propaganda, tetapi bagian dari tata kelola.

18. Good Governance, Ketahanan Nasional, dan Geopolitik

Daya saing nasional kini terkait erat dengan ketahanan nasional. Geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, energi, pangan, rantai pasok, teknologi, dan keamanan siber membuat negara harus mampu mengambil keputusan strategis. Namun strategi nasional hanya efektif jika tata kelolanya baik.

Ketahanan pangan membutuhkan data produksi, logistik, irigasi, riset benih, dan koordinasi pusat-daerah. Ketahanan energi membutuhkan regulasi investasi, transisi energi, tarif, subsidi, dan infrastruktur. Ketahanan digital membutuhkan keamanan siber, perlindungan data, talenta, dan cloud. Ketahanan fiskal membutuhkan disiplin APBN dan kualitas belanja. Semua ini adalah isu good governance.

Negara yang tata kelolanya lemah akan sulit menghadapi guncangan. Dalam krisis, data tidak sinkron, bantuan salah sasaran, koordinasi lambat, dan komunikasi kacau. Negara yang tata kelolanya baik lebih adaptif. Ia dapat merespons krisis dengan cepat, tetapi tetap akuntabel.

Daya saing nasional abad ke-21 adalah kombinasi produktivitas dan ketahanan. Good governance menjadi fondasi keduanya.

19. Dilema Indonesia: Negara Kuat atau Negara Efektif?

Indonesia sering membutuhkan negara kuat untuk mengarahkan pembangunan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa negara kuat saja tidak cukup. Negara kuat tanpa efektivitas dapat menghasilkan banyak aturan tetapi implementasi lemah. Negara kuat tanpa integritas dapat memperbesar rente. Negara kuat tanpa partisipasi dapat kehilangan legitimasi. Negara kuat tanpa data dapat salah sasaran.

Sebaliknya, negara efektif tidak berarti negara lemah. Negara efektif justru memerlukan kapasitas kuat: kapasitas fiskal, administratif, legal, digital, dan koordinatif. Bedanya, kekuatan itu diarahkan pada hasil publik, bukan sekadar kontrol.

Dilema Indonesia bukan memilih antara negara kuat dan negara efektif. Indonesia memerlukan negara yang kuat **karena efektif**, dan efektif **karena akuntabel**. Negara harus kuat dalam menegakkan hukum, tetapi tidak sewenang-wenang. Kuat dalam mengarahkan investasi, tetapi tidak menciptakan rente. Kuat dalam membangun infrastruktur, tetapi tidak mengabaikan lingkungan. Kuat dalam digitalisasi, tetapi tidak melanggar privasi. Kuat dalam reformasi, tetapi tetap mendengar warga.

Good governance adalah jalan tengah antara negara lemah dan negara otoriter. Ia menciptakan negara yang mampu bekerja, tetapi tetap dapat diawasi.

20. Strategi Reformasi Good Governance untuk Daya Saing Nasional

20.1 Membangun Birokrasi Berbasis Merit dan Kinerja

Reformasi birokrasi harus memperkuat meritokrasi. Rekrutmen, promosi, rotasi, dan penghargaan harus berbasis kompetensi dan integritas. Jabatan publik tidak boleh menjadi hasil transaksi politik. Aparatur perlu dilatih dalam data, digital, kebijakan publik, kolaborasi, dan manajemen risiko.

20.2 Menyederhanakan dan Menyelaraskan Regulasi

Regulasi perlu disederhanakan dan diharmonisasi. Namun penyederhanaan harus tetap menjaga perlindungan publik. Setiap regulasi strategis perlu analisis dampak, konsultasi publik, dan evaluasi berkala.

20.3 Memperkuat Rule of Law

Kepastian hukum harus menjadi prioritas. Penegakan hukum harus konsisten, pengadilan harus dipercaya, sengketa harus diselesaikan cepat, dan hukum tidak boleh menjadi alat kelompok kuat.

20.4 Mengendalikan Korupsi secara Sistemik

Antikorupsi harus masuk ke desain sistem: pengadaan terbuka, open data, beneficial ownership, perlindungan pelapor, audit digital, dan transparansi pembiayaan politik. Penindakan tetap penting, tetapi pencegahan harus diperkuat.

20.5 Membangun Digital Government Terintegrasi

Pemerintah digital harus berorientasi pada warga. Sistem data harus interoperabel, layanan harus mudah, keamanan siber harus kuat, dan perlindungan data harus dijaga. Digitalisasi bukan hanya membuat aplikasi, tetapi menyederhanakan proses.

20.6 Mengubah Anggaran Menjadi Dampak

APBN dan APBD harus dinilai berdasarkan outcome. Setiap program besar perlu indikator hasil. Program yang tidak efektif harus dihentikan atau diperbaiki.

20.7 Membuka Akses Ekonomi bagi UMKM dan Daerah

Daya saing nasional akan kuat jika basis ekonominya luas. UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri lokal, dan daerah harus memperoleh akses terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan legalitas.

20.8 Memperkuat Ekosistem Inovasi

Indonesia harus memperkuat riset, universitas, vokasi, startup, industri, dan pembiayaan inovasi. Tata kelola riset harus transparan dan berorientasi hasil.

20.9 Meningkatkan Transparansi Kebijakan

Naskah kebijakan, data, konsultasi publik, penerima manfaat, izin, konsesi, dan insentif perlu dibuka sejauh memungkinkan. Transparansi mengurangi capture dan meningkatkan kepercayaan.

20.10 Menjaga Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Keberlanjutan

Daya saing tidak boleh mengorbankan lingkungan dan keadilan sosial. Good governance memastikan pertumbuhan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

21. Tiga Skenario Masa Depan Daya Saing Indonesia

Skenario 1: Good Governance sebagai Mesin Daya Saing

Dalam skenario terbaik, Indonesia memperkuat birokrasi, hukum, regulasi, antikorupsi, digital government, pendidikan, riset, dan inovasi. Investasi masuk karena percaya pada institusi. UMKM naik kelas. Daerah menjadi pusat pertumbuhan baru. Hilirisasi menghasilkan teknologi dan lapangan kerja berkualitas. Dalam skenario ini, Indonesia bukan hanya tumbuh, tetapi naik kelas.

Skenario 2: Pertumbuhan Stabil, Tata Kelola Setengah Jalan

Dalam skenario moderat, Indonesia tetap tumbuh sekitar 5%, tetapi reformasi tata kelola berjalan lambat. Investasi masuk, tetapi sebagian masih berbasis sumber daya dan pasar domestik. Digitalisasi berjalan,

tetapi data belum terintegrasi. Korupsi menurun terbatas. Daya saing membaik pada beberapa sektor, tetapi belum menjadi keunggulan nasional.

Skenario 3: Daya Saing Tertahan oleh Tata Kelola Lemah

Dalam skenario buruk, korupsi, regulasi tidak konsisten, lemahnya hukum, dan birokrasi lambat menghambat produktivitas. Investasi mencari rente, bukan inovasi. UMKM tertinggal. Hilirisasi menimbulkan konflik lingkungan dan sosial. Kepercayaan publik melemah. Indonesia tumbuh, tetapi tidak naik kelas.

22. Kesimpulan

Good governance adalah fondasi daya saing nasional. Dalam ekonomi modern, negara tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam, penduduk besar, pasar luas, atau program pembangunan besar. Yang menentukan adalah apakah institusi bekerja. Hukum harus dapat dipercaya. Regulasi harus jelas. Birokrasi harus efektif. Korupsi harus dikendalikan. Data harus digunakan. Anggaran harus berdampak. Warga harus dilayani. Pelaku usaha harus mendapat kepastian. UMKM harus memperoleh akses. Inovasi harus didukung.

Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi itu tidak otomatis menjadi keunggulan. Indikator internasional menunjukkan adanya kemajuan sekaligus tantangan: Indonesia berada pada peringkat ke-40 dalam IMD World Competitiveness Ranking 2025, peringkat ke-55 dalam Global Innovation Index 2025, dan masih menghadapi tantangan serius dalam persepsi korupsi sektor publik dengan skor CPI 34 pada 2025. ([IMD Business School](#)) Data tersebut tidak boleh dibaca sebagai vonis, melainkan sebagai peringatan bahwa daya saing harus dibangun secara institusional.

Good governance bukan agenda tambahan setelah pertumbuhan tercapai. Good governance adalah syarat pertumbuhan yang berkualitas. Tanpa good governance, pertumbuhan mudah menjadi rente. Tanpa good

governance, investasi tidak selalu produktif. Tanpa good governance, sumber daya alam dapat menjadi kutukan. Tanpa good governance, digitalisasi hanya menjadi aplikasi. Tanpa good governance, APBN besar belum tentu menyejahterakan.

Daya saing nasional Indonesia harus dibangun dengan prinsip: negara efektif, hukum adil, regulasi cerdas, birokrasi profesional, korupsi terkendali, data terbuka, inovasi tumbuh, dan manfaat ekonomi tersebar luas. Pada akhirnya, bangsa yang paling kompetitif bukan bangsa yang hanya bekerja lebih murah, tetapi bangsa yang mengelola dirinya lebih baik.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban pejabat dan lembaga publik untuk menjelaskan keputusan, membuka informasi yang relevan, menerima pengawasan, dan bertanggung jawab atas hasil kebijakan.

Birokrasi Profesional

Aparatur pemerintahan yang bekerja berdasarkan kompetensi, meritokrasi, integritas, dan orientasi pelayanan publik.

Control of Corruption

Kemampuan negara membatasi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Daya Saing Nasional

Kemampuan suatu negara menciptakan kondisi yang memungkinkan produktivitas, inovasi, investasi, dan kesejahteraan meningkat secara berkelanjutan.

Digital Government

Penggunaan teknologi digital, data, dan desain layanan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Good Governance

Tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, partisipatif, adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Government Effectiveness

Kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, kompetensi aparatur, serta kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

Inovasi

Proses menghasilkan dan menerapkan gagasan, teknologi, produk, layanan, atau model bisnis baru yang menciptakan nilai tambah.

Korupsi

Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau jaringan tertentu.

Meritokrasi

Sistem yang menempatkan dan mempromosikan seseorang berdasarkan kemampuan, integritas, dan kinerja.

Regulatory Quality

Kualitas kemampuan pemerintah membuat dan melaksanakan regulasi yang mendukung aktivitas ekonomi sehat serta melindungi kepentingan publik.

Rule of Law

Prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua secara adil, konsisten, transparan, dan dapat diprediksi.

Tata Kelola Berbasis Data

Pengambilan keputusan publik yang menggunakan data akurat, terintegrasi, aman, dan dapat dievaluasi.

Transparansi

Keterbukaan informasi tentang proses, keputusan, data, penerima manfaat, dan hasil kebijakan publik.

Voice and Accountability

Kemampuan warga untuk berpartisipasi, memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi pemerintah.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. doi:10.1257/aer.91.5.1369

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). Persistence of power, elites, and institutions. *American Economic Review*, 98(1), 267–293. doi:10.1257/aer.98.1.267

Besley, T., & Persson, T. (2009). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. *American Economic Review*, 99(4), 1218–1244. doi:10.1257/aer.99.4.1218

Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of “Weberian” state structures on economic growth. *American Sociological Review*, 64(5), 748–765. doi:10.2307/2657374

Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. doi:10.1111/gove.12035

Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548. doi:10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x

Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83–116. doi:10.1162/003355399555954

IMD World Competitiveness Center. (2025). *IMD World Competitiveness Ranking 2025*. IMD.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3, 220–246. doi:10.1017/S1876404511200046

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. doi:10.2307/2946696

North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. doi:10.1257/jep.5.1.97

OECD. (2026). *Digital Government Outlook 2026: Indonesia*. OECD Publishing.

Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. *Harvard Business Review*, 68(2), 73–93.

Porter, M. E. (1998). *The competitive advantage of nations*. Free Press.

Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. doi:10.1257/aer.98.2.100

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. doi:10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025: Indonesia country profile*. Transparency International.

Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.

World Bank. (2026). *Worldwide Governance Indicators*. World Bank.

World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025*. WIPO.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 23 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>